

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini hipotesis mengenai hambatan program *Human Resources Development* Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh terbukti. Inefektivitas yang terjadi pada program HRD disebabkan kegagalan IMT-GT sebagai sebuah kerja sama sub-regional tidak berhasil untuk menciptakan integritas regional yang baik sesuai dengan sugesti neo-fungsionalisme. Hal ini disebabkan oleh: (1) minimnya transaksi lintas batas antar negara anggota, (2) tidak adanya bentuk pemerintahan transnasional, (3) kegagalan dalam membentuk skema *spillover*.

Teori neo-fungsionalisme menjabarkan tiga hal agar sebuah kerja sama dapat menciptakan integrasi regional yang baik, namun, IMT-GT gagal dalam menjalankannya. Pertama, transaksi lintas batas antar negara anggota terutama dalam bidang perekonomian cenderung sangat rendah, padahal baik Indonesia, Thailand maupun Malaysia termasuk negara yang memiliki tingkat arus perdagangan yang baik di Asia Tenggara. Kedua, tidak adanya pemerintahan supranasional yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi untuk membuat peraturan dan menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan kerja sama IMT-GT berbentuk *intergovernmentalisme*, sehingga negara merupakan pelaku utama dalam proses integrasi. Ketiga, kedua hal

tersebut pada dasarnya menjadi pen jembatan untuk dapat menciptakan skema *spillover*, ironisnya keduanya tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kegagalan dalam pembentukan *spillover*.

Oleh karenanya, hal tersebut berdampak pada hambatan HRD dalam menjalankan programnya disebabkan gagal dalam membentuk skema *spillover*. Hal ini dapat dipahami dengan tidak adanya perluasan program-program kerja dari HRD sebagai unsur penting dalam sebuah kerja sama regional. Kegagalan pembentukan *spillover* disebabkan dua hal: Pertama, sulitnya penyamaan standar dalam membentuk sebuah program, khususnya dalam pembentukan akreditasi pada bidang pariwisata, konstruksi, industri makanan dan perkapalan melalui pelatihan-pelatihan yang dibentuk. Hal tersebut disebabkan karena penyamaan standar sangat berpengaruh langsung pada pengembangan dan kualitas SDM tersebut. Selain itu, program Uninet sebagai satu-satunya program HRD di Aceh juga tidak berjalan dan tidak tepat sasaran.

Kedua, peran elit politik juga sangat berpengaruh untuk menyokong serta menentukan berjalannya faktor ekonomi melalui keberhasilan kerja sama dalam membentuk *spillover*. Namun, adanya kecenderungan untuk menyesuaikan program-program IMT-GT dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menjadi kendala. Peran elit politik dianggap relevan dalam keberhasilan kerja sama, karena neo-fungsionalisme tetap menganggap negara sebagai aktor penting. Sedangkan, tidak adanya sinkronisasi antara program prioritas dalam bidang pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan pada RPJMN dengan program-

program HRD yang di usung menyebabkan program HRD seakan jalan di tempat. Hal ini membenarkan teori neo-fungsionalisme bahwa, tidak berjalannya skema *spillover* mengakibatkan tidak terciptanya integrasi regional yang baik dan berdampak pada program-program yang di usung.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini masih mengandung kekurangan, yakni tidak menjelaskan lebih jauh mengenai dampak yang dapat ditimbulkan akibat kegagalan program HRD IMT-GT dalam mengurangi kemiskinan di Aceh. Oleh karenanya, peneliti menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian mengenai dampak yang dapat ditimbulkan akibat kegagalan program HRD IMT-GT dalam mengurangi kemiskinan di Aceh.

Terkait permasalahan hambatan program HRD IMT-GT, peneliti memiliki beberapa saran untuk berbagai pihak terkait, yakni: Pertama, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai perwakilan Indonesia dalam kerja sama IMT-GT bidang HRD untuk dapat lebih serius dan optimal dalam merealisasikan program-program yang ingin dijalankan. Kedua, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Koordinator Bidang HRD IMT-GT Provinsi Aceh untuk dapat menguatkan kerja sama dan komunikasi internal sehingga mengetahui program apa yang layak untuk dijalankan dan dapat mengurangi kemiskinan serta mengembangkan SDM di Aceh. Ketiga, Negara anggota IMT-GT,

dalam hal ini Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk dapat lebih serius dalam merancang, menyusun dan mengimplementasikan program-program yang di usung. Sehingga akan dapat berdampak langsung bagi keuntungan pada masing-masing negara anggota. Keempat, Bidang WGHRD IMT-GT, dalam hal ini jajaran perancang dan penyusun program untuk dapat melihat, menimbang dan menelaah program-program yang bermanfaat dan tepat guna bagi wilayah sasaran negara anggota.